

RISALAH RAPAT

KOMISI V DPR RI

(BIDANG PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, PERUMAHAN RAKYAT, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARDJO, BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU)

- Tahun Sidang : 2013-2014
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/Tanggal : Selasa, 18 Februari 2014
W a k t u : Pukul 13.50 WIB s.d. 14.50 WIB
T e m p a t : Ruang Rapat Komisi V Gedung Nusantara (KK-V)
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : Drs. Laurens Bahang Dama
(Ketua Komisi V DPR RI)
- Acara : 1. Pembahasan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013 BPK RI pada Kementerian Perumahan Rakyat
2. Pembahasan terhadap Tindak Lanjut Hasil Kunjunga Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Jalur Pantura, Sinabung, Manado, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
- Sekretaris Rapat : Dra. Prima M.B. Nuwa
(Kabag Set. Komisi V DPR RI)
- H a d i r : A. Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI :
.... **dari 55** Anggota dengan rincian :
1. **Fraksi Partai Demokrat**
... dari 13 orang Anggota;
2. **Fraksi Partai Golongan Karya**
.... dari 9 orang Anggota;
3. **Fraksi PDI Perjuangan**
... dari 8 orang Anggota;
4. **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**
... dari 5 orang Anggota;
5. **Fraksi Partai Amanat Nasional**
... dari 5 orang Anggota;
6. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**
... dari 4 orang Anggota;

7. **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**
... dari 3 orang Anggota;
8. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**
... dari 2 orang Anggota;
9. **Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat**
... dari 2 orang Anggota.

- B. Lembaga Negara : -
- C. Pemerintah : -
- D. Undangan yang lain : -

DRAFT

DAFTAR HADIR ANGGOTA KOMISI V
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA
TANGGAL 18 FEBRUARI 2014

NO.	N A M A	NO. ANGGOTA
PIMPINAN		
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT		
FRAKSI PARTAI GOLKAR		
FRAKSI PDI PERJUANGAN		

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL		
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
FRAKSI PARTAI GERINDRA		
FRAKSI PARTAI HANURA		

KETUA RAPAT:

Kita mulai aja Pak Menteri?

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Selama Siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI
Yang terhormat Menteri Perumahan Rakyat beserta jajarannya
Dan hadirin yang kami muliakan.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia dan rahmat kepada kita pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita dalam keadaan sehat wal afiat.

Berdasarkan informasi dari Sekretariat bahwa daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani sebanyak 12 Anggota dan 15 Anggota izin dari 56 Anggota Komisi V DPR RI dan dari lebih dari separuh unsur fraksi ini dari 5 fraksi sehingga telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 245 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkan saya membuka rapat pada hari ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) raker ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.50 WIB)

Sebelum kami melanjutkan rapat ini kami memperkenalkan Anggota baru Pak Menteri, Bapak Saan Mustofa dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Barat 7. Pindahan dari Komisi III menggantikan Bapak Zulkifli dari Partai Demokrat. Biasanya selalu duduk disebelah kanan Pak Menteri, Pak Zul.

Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Saudara Menteri Perumahan Rakyat beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami dalam raker pada hari ini.

Sebagaimana undangan yang telah disampaikan raker hari ini diagendakan untuk acara yang pertama, pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2013 BPK RI pada Kementerian Perumahan Rakyat. Yang kedua, Pembahasan terhadap tindak lanjut hasil kunjungan kerja spesifik ke beberapa daerah baik di Pantura, Sinabung, Manado, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta, dan sebagainya. Khusus untuk agenda yang kedua ini nanti akan disampaikan setelah Pak Menteri menyampaikan hasil audit BPK ini.

Saudara Menteri Perumahan Rakyat dan Anggota Komisi V yang kami hormati,

Dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 1 Oktober 2013 yang lalu, BPK RI telah menyampaikan hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2013. Sebagai tindak lanjutnya sesuai dengan mekanisme yang diatur didalam undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 113 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 70 huruf a dan huruf b, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI telah melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemerinsaan BPK tersebut yang hasilnya telah disampaikan kepada Komisi-komisi sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 serta Pasal 53 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPR RI, Keuangan negara dan Pelaksanaan APBN termasuk pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya. Secara umum kami cukup prihatin atas opini dari BPK RI terhadap laporan keuangan tahun 2012 Kementerian Perumahan Rakyat yang

masih mendapat predikat wajar dengan pengecualian. Kalau boleh ditingkatkan untuk tahun 2013 atau tahun 2014 ini.

Berdasarkan hasil telaahan dan rekomendasi BAKN DPR RI terhadap hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2013 BPK RI yang disampaikan kepada Komisi V DPR RI, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut oleh Kementerian Perumahan Rakyat khususnya yang terkait hasil pemeriksaan atas kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang cukup signifikan yaitu :

- a. Pengawasan dan Pengendalian oleh pejabat terkait atas pelaksanaan jasa konsultasi kurang optimal, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp.847.063.630,-
- b. Pihak BRI tidak memberikan bunga dari dana bantuan stimulan perumahan swadaya yang tersimpan dalam rekening BRI masyarakat, sehingga terjadi potensi pendapatan negara bukan pajak yang hilang sebesar Rp. 466.350.804,-
- c. Rekanan tidak melaksanakan kewajiban nilai kontrak yang diperjanjikan dalam pembangunan rusunawa dan kelemahan pengawasan pengendalian atasan langsung sehingga terjadi kelebihan pembayaran negara kepada rekanan sebesar Rp. 351.328.826,34 sen.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pembangunan rusunawa kurang optimal sehingga terjadi potensi kerugian negara sebesar Rp.276.207.007,-
- e. Kurangnya pengawasan atas pejabat terkait atas pekerjaan pembangunan rumah khusus sehingga terjadi potensi kerugian negara sebesar Rp.1.714.841.700,- dan
- f. Ketidapkahaman Pejabat Kemenpera atas ketentuan peraturan perundang-undangan, lemahnya perencanaan penyaluran dana stimulan perumahan swadaya dan lemahnya pengendalian dan pengawasan oleh pejabat terkait mengakibatkan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp.85.801.000.000,- tidak dapat diyakini kewajarannya. Kemudian bantuan stimulan sebesar sekitar Rp.50.675.200.000,- menjadi tidak akuntabel. Dan belanja bantuan sosial sebesar Rp.2.543.000.000,- belum tersalurkan.

Saudara Menteri Perumahan Rakyat dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Demikianlah pengantar dari kami, untuk menyingkat waktu kami persilahkan Saudara Menteri Perumahan Rakyat untuk menyampaikan tindak lanjut dari temuan BPK itu. Untuk itu kepada Pak Menteri kami persilahkan.

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT (H. DJAN FARID) :

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang terhormat Bapak Ketua Komisi V DPR RI;

Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Komisi V yang juga sangat kami hormati;

Bapak/Ibu Anggota Komisi V dan hadirin yang kami hormati,

Perlu kami jelaskan jumlah temuan BPK sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 sebanyak 83 kejadian dengan nilai temuan sebesar Rp. 184,4 milyar. Dalam hal ini BPK telah memberikan saran, rekomendasi, tindak lanjut kepada Kemenpera sebanyak 107 saran, yang sebagian besar terjadi pada laporan keuangan tahun 2014. Untuk itu Kemenpera telah menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan telah menyelesaikan 42 kejadian dan melaksanakan 51 rekomendasi dengan nilai temuan yang telah diselesaikan sebesar Rp.181,38 Milyar. Atau sekitar 98,3% dari total nilai temuan.

Kemenpera saat ini masih terus menindaklanjuti penyelesaian temuan BPK sebanyak 41 kejadian yang mencakup 56 rekomendasi dengan temuan tinggal 3,1 milyar atau tinggal 1,7% dari total nilai temuan.

Yang terhormat Bapak Ketua dan Para Anggota Komisi V,

Secara umum dapat kami sampaikan bahwa tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Kemenpera terhadap temuan BPK antara lain adalah:

1. Melengkapi semua kegiatan dengan standar operasional prosedur (SOP) khususnya untuk kegiatan BLU, BPS dan rusunawa;
2. Memberikan sanksi teguran atau sanksi disiplin pegawai
3. Menetapkan tim penyelesaian kerugian negara
4. Menarik dan menyetorkan temuan yang berpotensi memberikan kerugian negara
5. Memperkuat peran pengawasan intern pemerintah antara dengan memberikan tambahan tenaga auditor sinergi dengan APIP lainnya.
6. Mengimplementasikan sistem pengendalian internal pemerintah, reformasi birokrasi dan sistem akuntabel kinerja instansi pemerintah

Sehubungan dengan meletusnya gunung sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara, dan berdasarkan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Karo, kami telah mengidentifikasi rumah yang mengalami rusak berat yang mencapai sekitar 1.736 unit dan rusak ringan sebanyak 30 unit. Dengan asumsi seluruh kerusakan akan mendapat bantuan perbaikan rumah stimulan perumahan swadaya, maka total anggaran yang dibutuhkan sekitar 26,190 milyar. Dalam hal ini kami sampaikan bahwa kegiatan perbaikan rumah rusak berat dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah baru baik di lokasi eksisting maupun di lokasi baru menjadi program relokasi penduduk oleh pemerintah.

Sejalan dengan program perbaikan rumah yang rusak tersebut perlu dibangun MCK Komunal. Agar lingkungan hunian menjadi layak huni. Untuk itu diperkirakan perlu dibangun 10 MCK Komunal dengan biaya sebesar 1,05 milyar. Dengan demikian total anggaran yang dibutuhkan untuk menanggulangi perbaikan rumah rusak yang dilengkapi dengan MCK Komunal diperkirakan mencapai 27,24 milyar. Khusus untuk perbaikan rumah berat dan pembangunan MCK komunal kegiatannya baru dapat dilaksanakan jika sudah tersedia lahan.

Mengenai rencana penanganan dampak bencana di kota Manado. Bencana banjir bandang di kota Manado pada tanggal 14 Januari 2014 telah mengakibatkan kerusakan rumah yang cukup besar, dengan total 11.266 unit. Sebanyak 4.496 unit diantaranya mengalami rusak berat, sebanyak 1.971 unit rusak sedang, dan sebanyak 4.799 unit rusak ringan. Untuk memperbaiki seluruh kerusakan ini maka dibutuhkan anggaran 111,14 milyar. Untuk melengkapi perbaikan rumah tersebut dibutuhkan perbaikan MCK komunal sebanyak 15 unit dengan anggaran 1,57 milyar. Mengingat sebagian penduduk perlu direlokasi karena menempati daerah berbahaya dan tidak sesuai dengan tata ruang dan sebagaimana permintaan dari Sulawesi Utara, maka di kota Manado perlu dibantu pembangunan rusunawa sebanyak 2 twin block dengan total alokasi 20 milyar. Dengan demikian jumlah kebutuhan anggaran keseluruhan untuk penanganan dampak banjir bandang di Manado sekitar 132,72 milyar.

Mengenai bantuan program prioritas Kemenpera di kota Cirebon. Dalam rangkamengantisipasi permintaan pemerintah kota Cirebon pada saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke jalur Pantura, dapat kami jelaskan bahwa pada tahun 2014 Kemenpera telah merencanakan bantuan program prioritas perumahan swadaya sebesar 400 unit dengan total 3 milyar. Dan bantuan pembiayaan FLPP 400 unit dengan total biaya 31,37 milyar. Dengan demikian total bantuan untuk kota Cirebon akan mencapai 34,37 milyar.

Dapat kami sampaikan bahwa bantuan program prioritas Kemenpera yang lain pada prinsipnya masih dapat dimanfaatkan sesuai dengan kesiapan lokasi, kesesuaian kriteria dan berdasarkan kesepakatan.

Demikian kami sampaikan untuk kiranya kami mohon dukungan Komisi V DPR RI, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wallahu wafiq ila wamin tharik. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Kalau Pak Menteri sebelumnya sudah menyampaikan sebenarnya sih kita memberikan beberapa rekomendasi kami hasil kunjungan kerja spesifik Pak Menteri, tetapi ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, tetapi mungkin sebelum kita memberikan tanggapan dan masukan terhadap audit BPK ada beberapa rekomendasi dari Komisi V Pak Menteri. Yang pertama, yang tujuan kunjungan spesifik ke jalur Pantura, itu Kabupaten Indramayu dan kota Cirebon. Rekomendasinya bahwa banyak rumah yang rusak atau hancur kurang lebih 4.700 rumah rusak, berdasarkan data dari Sekretaris Daerah Pemkab Indramayu, Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI minta Kementerian Perumahan Rakyat menginventarisasi dan membantu perbaikan rumah-rumah tersebut melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau pembangunan rumah baru. Kemudian yang kedua yang ke Manado, yang terkena musibah banjir bandang, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perumahan Rakyat dan PU relokasi penghuni yang berada pada bantaran sungai yang rumahnya hanyut, rusak ringan dan rusak berat pada saat banjir bandang kurang lebih 13.790 rumah dilakukan, dan pembangunan rumah sederhana rumah susun sesuai dengan undang-undang penataan ruang. Kemudian yang ke Kabupaten Karo, yang terkena bencana erupsi gunung Sinabung, rekomendasi dari komisi V dalam pemberian program bantuan stimulan perumahan swadaya pasca bencana pada warga pada radius lebih besar dari 3 KM, Tim Kunjungan Kerja Komisi V meminta Kementerian Perumahan Rakyat untuk bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional agar bantuan yang diberikan tepat jumlah dan tepat sasaran. Tadi Pak Menteri sudah sampaikan juga. Kemudian yang Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogja, yang pertama Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, rehabilitasi dan renovasi perumahan dan permukiman yang terdampak banjir dan tanah longsor di Purworejo. Kemudian b yang kabupaten Kulonprogo Provinsi DI Yogyakarta, a. penanganan rumah tidak layak huni sebesar 27.553 unit, saampai 2013 sudah ditangani 1.606 unit. Kemudian usulan penambahan rusunawa 2 twin block kurang lebih 192 kamar. Kemudian usulan yang c kabupaten bantul provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta penanganan rumah tidak layak huni dan lingkungan permukiman, dan d, perbaikan rumah tidak layak huni sebesar 1000 unit kurang lebih 7 milyar 500 juta. Kemudian di Kabupaten Gunung Kidul itu pemenuhan perumahan layak huni melalui program rehabilitasi rumah sebanyak 18.958 unit rumah. Kemudian kota Yogyakarta terkait 15 persen penduduk yang tinggal di bantaran sungai kami usulkan pembangunan rusunami. Kemudian Kabupaten Sleman rumah tidak layak huni mencapai 21 897 unit terdapat permukiman di wilayah kawasan rawan bencana, c potensi kawasan kumuh perkotaan, dan d pertumbuhan permukiman yang sporadis perlu dioptimalisasi pengendalian alih fungsi lahan seusia rencana tata ruang.

Demikian beberapa rekomendasi dari kunjungan Komisi V ke beberapa tempat Pak Menteri. Selanjutnya kami persilahkan Anggota Komisi V menyampaikan tanggapan atau masukan terhadap yang pertama khususnya yang terkait dengan hasil audit BPK tersebut. Hanya itu saja. Kami persilahkan. Silahkan Pak Sigit.

F-PDIP (YOSEPH UMAR HADI):

Pak Ketua, Pak Ketua interupsi sebentar. ini tidak hanya masalah BPK tetapi yang lain juga bisa ya.

KETUA RAPAT:

Tidak, hanya khusus masalah BPK saja. Tanggapan untuk yang lain juga.

F-PDIP (YOSEPH UMAR HADI):

Artinya nanti diberi kesempatan untuk yang lain. Artinya kunjungan tadi, menyangkut masalah kunjungan.

KETUA RAPAT:

Kita sekarang nyangkung ke masalah audit BPK dulu. Silahkan Pak Sigit.

F-PDIP (YOSEPH UMAR HADI):

Iya BPK dulu ga papa.

F-PKS (Ir. SIGIT SOSIANTOMO):

Ketua terimakasih. Ini terkait audit BPK.

**Pimpinan Komisi V yang saya hormati,
Rekan-rekan Komisi V dan Pak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati,**

Saya ingin menyampaikan ketidaksetujuan saya dengan jawaban Pak Menteri terkait dengan laporan BPK. Sebetulnya yang ada dalam ingatan saya adalah Kementerian Perumahan Rakyat ini seingat saya selalu WTP. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh pak Ketua, nah sekarang mengalami penurunan status menjadi WDP. Saya rasa langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri saya rasa kurang atau tidak pada persoalan yang ada. Menurut saya SOP saya yakin sudah ada, karena kan pernah WTP, beberapa tahun WTP. Saya kira SOP sudah ada.

Kemudian memperkuat yang poin kelima itu memperkuat aparat pengawasan intern, saya yakin juga itu sudah ada. Yang keenam mengimplementasikan sistem pengendalian, kita tidak tahu persis detailnya bagaimana tapi saya yakin itu juga pasti sudah ada. Menurut saya yang kurang adalah masalah leadership, masalah kepemimpinan. Dan ini kami rasakan ketika kami menyampaikan usulan-usulan aspirasi yang sering kita berikan dan ternyata sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Jadi menurut saya persoalannya adalah masalah leadership. Saya tidak sepakat dengan upaya yang dilakukan oleh Pak Menteri. Jadi menurut saya ketua, ini catatan kami Anggota Komisi V, ini persolan kepemimpinan, sudah pernah WTP tentu semuanya standarnya sudah lengkap ya, tinggal bagaimana Pak Menteri untuk fokus memperbaiki dan menjaga prestasi yang dulu telah dimiliki dan telah didapat oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Saya kira catatan saya satu itu saja sebagai Anggota Komisi V saya berhak menilai kinerja dari Kementerian Perumahan dan itu kesimpulan saya.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Masukan Pak Menteri. Jangan turun grade nya mesti naik, paling tidak mempertahankan. Mungkin ada lagi? Pak Yoseph, silahkan.

F-PDIP (YOSEPH UMARHADI):

Terimakasih Pak Ketua.

Pak Menteri yang saya hormati dengan seluruh jajaran, dan Pimpinan serta Anggota sekalian yang saya hormati,

Yang pertama mungkin yang terkait dengan masalah temuan BPK, yang disajikan pada kita memang sejak tahun 2008 sampai tahun 2012 yang senilai 184 dan dapat ditindaklanjuti atau diselamatkan sekitar 181 milyar, masih tersisa 3,1 milyar. Ya ini saya kira satu prestasi juga bahwa Kementerian ini bisa melaksanakan rekomendasi serta menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi temuan BPK dan tinggal sisa 3 M ini akan lebih baik kalau juga bisa tuntas semuanya artinya bisa diselamatkan juga. Namun demikian barangkali juga mungkin laporan BPK temuan BPK ini terkait juga masalah administrasi dan keuangannya. Yang saya ingin tekankan, mungkin rekan-rekan juga ingin mendengarkan ialah efektifitas dan ketepatan sasaran dan manfaat dari semua program terutama menyangkut BA 99 yaitu FLPP. Meskipun FLPP ini tidak mengalami banyak penyimpangan tetapi yang selama ini kita perhatikan adalah ketidakserapannya yang menggembirakan. Jad sebenarnya kalau boleh dikatakan ini merupakan potensi kerugian-kerugian meskipun kerugian itu tidak sifatnya volume atau kuantitas administrasi, tetapi potensi yang seharusnya itu bisa dimanfaatkan kalau itu bisa direalisasikan tetapi tidak, nah ini potensi potensial loss itu yang sebenarnya lebih penting dan juga pengaruhnya lebih besar. Kan kalau itu bisa terserap dengan baik FLPP itu maka akselerasi ekonomi dengan perumahan itu. Kecuali kegiatan pembangunan dan masyarakatnya yang menggunakan itu bisa, demikian juga barangkali mungkin dalam hal bunga, kalau dibungakan juga bunganya lebih tinggi kalau misalnya itu di. Nah itu saya kira perlu di kita tidak hanya minimalis ya, kita upayakan optimalis dan maksimalis untuk melaksanakan anggaran tersebut, tidak hanya sejauh mana itu terjadi temuan-temuan yang sifatnya administrasi dan keuangan, tapi kami menyarankan itu juga menjadi perhatian dari pemerintah kita tidak puas hanya dengan wajar tanpa pengecualian, tetap betul-betul itu wajar tanpa pengecualian plus itu bermanfaat betul bagi rakyat dan terlaksana secara terserap secara penuh, begitu yang menjadi harapan kita. Sehingga mendapatkan pujian atau mendapatkan penghargaan yang lebih dari hanya sekedar WTP yang tadi disampaikan Pak Sigit tadi. Itu yang kaitannya dengan masalah temuan BPK.

Kemudian ini sekaligus saya menambahkan Pak Menteri, kemarin karena saya ditugaskan oleh Pimpinan untuk memimpin kunjungan ke Pantura dalam rangka bencana banjir, jadi betul bahwa kalau tadi Bapak menyampaikan yang terjadi di Kota Cirebon, justru kota Cirebon itu tidak mengalami bencana Pak, bencana juga tetapi tidak ada rumah yang rusak, kecuali memang rumah yang tidak layak huni akibat memang tidak bukan karena bencana tetapi persoalan ketidakmampuan masyarakat untuk memperbaiki rumah itu ya, saya juga terimakasih bahwa ada program ini dan ini tentu kita kan melihat nanti bagaimana realisasinya. Tetapi yang lebih penting adalah kaitannya bahwa korban banjir ini adanya di kota Indramayu Pak. Jadi Indramayu paling parah. Jadi hampir 70 persen wilayah daerah itu tergenang oleh air. Dan bukan karena kesalahan mereka, lain hal nya ditempat lain Pak. Seperti kemarin kita berkunjung ke Manado itu ya bagaimana tidak rusak orang rumahnya itu berada diatas sungai, jadi ketika air mengalir seperti tsunami dari atas itu dengan sendirinya menghanyutkan seluruh rumah-rumah disepanjang bantaran sungai tadi.

Maka ini satu persyaratan yang Bapak harus ikut menekan rekomendasi dari komisi itu bahwa tata ruang harus direvisi lebih dahulu, 15 meter dari bantaran sungai dan lain sebagainya. Jadi ketika Bapak akan memberikan bantuan perumahan, sebab ada masyarakat yang rumahnya sudah tidak bisa dipakai lagi sudah jadi sungai disitu. Sudah jadi sungai, jadi ndak mungkin dibangun rumah diatas sungai itu kan tidak mungkin kan harus direlokasi. Tetapi kan ini sifatnya masif di Manado ini sehingga perlu direvisi mengenai tata ruang. Maka Bapak harus sebaga salah satu rekomendasi ketika akan memberikan bantuan itu walikota harus melakukan revisi dulu. Termasuk juga mengenforce supaya

pembangunan-pembangunan sesuai dengan tata ruang. Jadi banyak daerah-daerah yang kawasan resapan itu sekarang ini sudah amburadul. Jadi ini juga berbahaya sekali bagi kehidupan bermasyarakat di Kota itu. Ini yang harus diperbaiki.

Lalu yang tadi saya katakan di Indramayu tadi sekitar 4.700 inventarisasi saya ketika saya melakukan kunjungan dan bertemu dengan Bupati disana yang memang itu bukan karena kesalahan mereka tetapi karena memang banyak jalan-jalan di pantura itu yang jembatannya gorong-gorongnya sangat kecil. Sehingga air yang mengalir itu tidak mampu mengalir sehingga dia harus menggenangi warga sehingga warga masyarakat rumah itu hancur dan hanyut, saya kira yang mohon dianggarkan tentu mayoritas di Indramayu sekitar 4.700 tadi Pak, mungkin bisa melalui BSPS, plus memang kumunal seperti MCK dan lingkungan permukiman saya kira juga perlu mendapatkan perhatian mengenai itu. Itu yang kedua.

Yang ketiga kaitannya dengan evaluasi sedikit Pak. Menyangkut masalah BPS. Ini saya kira Pemerintah melakukan evaluasi terhadap proses pencairan BPS yang selama ini terjadi. Karena banyak demo oleh masyarakat dimana 7,5 jut itu tidak sampai kepada masyarakat itu 7,5 juta. Mungkin sekitar 5 juta, 6 juta, demo kepada kepala desa kepada pemerintah daerah. dan itu menjadi temuan sebenarnya, kalo boleh dikatakan temuan untuk tahun 2014 ini, ini apakah memang tidak ada anggaran untuk tukangya atau tidak ada anggaran untuk pembangunannya karena kan diberi materi diberi material ya diberi pasir, semen dan sebagainya, tapi jumlahnya itu kalau dihitung-hitung tidak sampai 7,5. Alasan para kuwu itu dikatakan kan untuk keperluan ongkos angkutnya, untuk keperluan membangunnya dan sebagainya itu. Padahal sebenarnya juga ada anggaran tersendiri. Jadi saya kira perlu dibakukan model apa yang paling baik, setiap tahun berubah kan caranya, mekanisme pencairan itu kan. Ini yang saya kira perlu kita evaluasi bagaimana masyarakat itu betul-betul secara utuh memperoleh bantuan tadi. Kita prihatin pak memang dengan adanya banjir ini backlog semakin bertambah ya, sementara kita terus berjalan ditempat dalam upaya kebijaksanaan kita untuk dari sisi regulasi maupun dari sisi penganggaran boleh dikatakan kita tidak progresif tetapi sangat standar dan sangat biasa-biasa saja. Persoalan luar biasa, kita menyelesaikannya dengan biasa-biasa saja.

Demikian Pak Ketua, terimakasih.

KETUA RAPAT:

Trimakasih. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi dari Pimpinan. Silahkan Pak.

F-PG (H. MUHIDIN M.SAID, SE, MBA) :

Soalnya kalau tidak bicara Pak Menteri terlalu cepat selesai. Itu yang saya takut. Kita dibayar di sini. Terima kasih.

Pak Menteri yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabakaatuh.

Saya sedikit saja Pak memang tadi disampaikan Pak Yoseph itu menyangkut masalah BPS, ini sebenarnya banyak problem di lapangan terutama masalah aparat kita yang ada di daerah yang dikuasakan. Ini problem Pak. Tapi kalau kami punya kita bisa mengetahui itu kita bisa mengantisipasi. Di daerah saya banyak Pak ikut bermain macam-macam, tetapi karena saya sering temukan saya panggil mereka, bahkan ada yang saya ganti rugi, bantu dia kembalikan karena jaksa sudah panggil. Daripada kementerian jadi isu yang tidak bagus. Kecil-kecil sih karena duitnya juga kecil. Tetapi ini kan menyangkut hukum, pencitraan kementerian. Jadi saya ada baru nanti setelah kejadian ribut. Saya panggil saya tangani, jadi memang apa yang disampaikan Pak Yoseph itu kadangkala dia akan ikut bekerja di dalam Pak. Ikut melakukan pembelian dan lain lain. Ini kecil tetapi kalau dijumlah

umpamanya 1.000 rumah, sudah 7,5 miliar. Kan begitu Pak. Ini yang harus kita, terutama rekan-rekan kita di dinas-dinas daerah. Ya memanfaatkan ini, karena di daerah yang sudah miliaran itu dia 7,5 juta tetapi kalau sudah 1.000 rumah kan 7,5 miliar. Di daerah apalagi di kabupaten Pak, besar sekali ini Pak. Inilah yang dimanfaatkan celah-celah ini. Sehingga saya ada beberapa desa saya bantu bayar Pak. Karena dia sudah mulai ditahan jaksa. Oleh karena itu barangkali kami diberitahu siapa PPKnya, Siapa, apa namanya itu satkernya Pak. PPK nya toh? Kalau kita bisa tahu sebenarnya kita lakukan koordinasi supaya dia jangan membuat hal-hal yang bisa membuat kredibilitas kementerian jadi jelek. Jadi banyak sebenarnya itu Pak jadi bulan-bulanan sama petugas. Ini mungkin kemudian pada saat mereka melakukan survei di daerah ini juga harus kita tahu Pak apalagi kalau di daerah pemilihan kita. Ini biasa diperdagangkan juga kan ini. Oleh orang-orang daerah bukan orang pusat. Ini banyak kejadian. Karena mungkin ya kadangkala kan kalau pejabat di sana juga mau Pilkada kan ramai dimanfaatkan ini. Paling manis ini Pak. Ya jujur saja ini kalau ini dipertainkan ini. Akhirnya rakyat jadi korban. Jadi ribut dan lain-lain sebagainya. Ini saya kira.

Kemudian saya menghimbau kemarin saya baca di majalah itu kan ada terkait juga dengan ini, kalau saya lihat ini mungkin dari humas nanti melakukan komunikasi dengan pers Pak, ini perlu semua ini karena inikan proyeknya kecil Pak tapi terkait langsung dengan rakyat kecil. Sedikit saja letupannya pasti ramai Pak. Karena yang dikorbankan adalah rakyat kecil. Kalau rakyat besar diambil 100 ribu, 50 ribu, tidak ada artinya. Ini mohon supaya yang melakukan juga komunikasi dengan pers ya supaya ada koordinasi dengan bagus sehingga tidak terjadi hal-hal yang saya baca di Gatra itu kelihatan sekali. Kalau saya tidak salah Gatra hari Jumat kemarin. Tempo juga ya. Tempo hari Senin. Hari Senin kemarin kan ya? Ada Pak, saya baca Pak. Saya baca kemarin. Justru itu saya minta supaya dilakukan koordinasi. Ini kalau kita lihat kerugiannya kan kecil sekali Pak. Tapi bagaimanapun juga di situ kan Kementerian Perumahan disebut. Ini tidak bagus, Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi kemudian hal-hal kita koordinasikanlah. Kita di sini kan banyak ada 54 Anggota, kalau teman-teman ini membantu saya kira tidak ada problem Pak. Kita redam, kita tangani karena tidak terlalu besar. Tapi kan menyangkut masalah orang miskin, ini problem. Sedangkan beras raskin saja orang mempersoalkan Pak. Beras raskin saja bisa dipotong-potong, apalagi yang 7,5 juta. Rakyat itu diberikan 7,5 saya kira Pak Djamil lihat, jalan kaki 2 hari 2 malam dapatkan 7,5 nangis dia dapat itu. Dia tidak pernah bayangkan, bayangkan Pak itu. Jadi oleh karena itu saya kira kita-kita semua harus ikut bagaimana mengawal ini program yang begitu murni dan begitu mulia ini untuk kepentingan rakyat miskin. Supaya betul-betul sampai sasaran dengan baik tanpa ada potongan-potongan.

Kemudian menyangkut masalah WTP dengan WDP saya kira upaya yang telah dilakukan ini harus betul-betul dilakukan pengawalan. Bagaimana pun juga apa yang selama ini kita dapatkan sudah WTP tiba-tiba mundur menjadi WDP ini kan agak kurang bagus Pak. Oleh karena itu saya kira langkah-langkah ini harus diperbaiki sehingga tahun depan kita bisa jadi WTP lagi Pak. Sama dengan Kementerian PU kita kawal akhirnya sekarang jadi WTP Pak. Bayangkan Kementerian PU berapa triliun dia punya asset. Bisa sampai jadi WTP. Saya kira kalau Kementerian Perumahan ini kalau kita semua bekerja dengan bagus saya kira bisa kita lakukan.

Kemudian mungkin ada juga sedikit ada beberapa proyek-proyek kita yang sering menjadi kelemahan-kelemahan kita uang sering melampaui tahun anggaran. Ini harus juga perlu kita pikirkan. Jangan sampai jadi persoalan baru kita mengambil langkah-langkah. Ini saya kira pengadministrasian itu, jadi proses-proses administrasi ini sebenarnya penting Pak ini. Proses administrasinya karena kita melakukan kalau toh dia melewati tahun anggaran, lebih baik sekalian kita melewati sedikit daripada kita melakukan pada saat bulan Desember Oktober. Ini mungkin dari rumah susun Pak, ini juga kami ada temukan ini. Artinya kalau memang terlalu ini lebih baik loncangin saja nanti Januari supaya tidak menjadi curiga daripada aparat. Kita sudah salah, tetapi kita juga buat ruang. Karena kita melaksanakan bulan-bulan November Desember. Kan tidak mungkin ada proyek bangunan berlantai dilaksanakan awal bulan Desember. Kan tidak mungkin itu. Jadi aparat pasti mencurigai akhirnya menjadi masalah. Kalau memang lebih bagus kita Loncat di bulan Januari sehingga kita bisa berargumentasi ini bulan depan, mereka tidak sampai ke situ. Tapi kalau kita mulai bulan Oktober,

bulan Desember, November, pasti mereka curigai apa bisa selesai. Bangunan yang konstruksi berlantai 2-3 ini dimulai sekarang itu akhirnya membuat ruang untuk kita dicurigai. Sebenarnya ini strategi saja yang bagus. Tujuan kita semua bagus, untuk menyerap anggaran yang bagus sehingga tapi kita membuat ruang sendiri untuk dicurigai orang. Kalau bangunan kecil seperti rumah-rumah seperti bantuan rumah swadaya itu tidak ada masalah karena 7 juta sebulan bisa selesai. Tapi kalau rumah bersusun Pak, rumah susun Pak, tidak mungkin. Jadi jangan kita membuat kegiatan-kegiatan yang bisa dicurigai membuat ruang untuk dilakukan pemeriksaan. Saya ingatkan ini supaya kita semua bisa bantu. Bagaimanapun juga menyangkut Bapak menyangkut kami juga, karena kami adalah pengawasan daripada kementerian ini, adalah mitra dari kami. Jadi kalau kami ditanya pers kita juga bingung Pak. Mau jawab apa ini apalagi kalau dari pihak petugas hukum umpamanya dari menanya kita Pak apa benar ini ada begini. Kita akhirnya kita juga jadi bingung. Ini mungkin harus kita hindari semua. Kalau bangunan kecil silakan seperti bangunannya Pak Djamil tidak masalah, itu bulan November, juga bulan Desember selesai itu. Tapi kalau sudah apanamanya Rusunawa, wah itu mengundang kecurigaan Pak. Saya kira inilah yang bisa kita pelajari sehingga ke depan ini kita bisa lebih bagus lagi.

Saya kira demikian Pak Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terimakasih. Sebelum Pak Menteri menjawab ini mungkin perlu itu yang belum ditindaklanjuti kan ada 31 juta, ada 128 juta, ada 64 juta, sekitar 200 sekian juta, kira-kira kapan itu Pak Menteri ditindaklanjuti karena kecil nilainya. Ya kan perlu itu kita tahu juga. Saya rasa itu kami persilakan Pak Menteri menjawab.

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT

Terima kasih banyak Pak Ketua.

Jadi Pak Sigit, sedikit penjelasan waktu kita turun dari WTP menjadi WDP itu memang ada permasalahan di rumah swadaya. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan bantuan rumah swadaya itu sifatnya bantuan sosial. Jadi kalau bantuan atau uang itu sudah sampai di rekening penerima, tugas kami sebagai Kementrian Perumahan sudah selesai. Itu yang sudah, jadi peraturan dari Menteri Keuangan. Jadi pada saat itu uang yang sudah sampai ke masyarakat oleh masyarakat karena musim hujan Oktober, November, Desember itu kan masih musim hujan, ada yang belum melaksanakan. Jadi rekeningnya tabungan mereka itu masih 100 persen penuh. Nah itu yang dianggap temuan oleh BPK. Mereka menganggap bahwa ini anggaran belum dimanfaatkan. Jadi harusnya uang itu dikembalikan. Oleh kami uang itu tidak dikembalikan. Kami berkonsultasi dulu dengan Departemen Keuangan karena sesuai dengan PMK itu uang itu sudah menjadi hak masyarakat, karena sudah ada di rekening mereka masing-masing. Itulah yang menyebabkan kami turun WTP menjadi WDP karena kami tidak mau mengembalikan uang itu ke kas negara. Tapi setelah ada keputusan dari Menteri Keuangan baru kami kembalikan. Tapi waktu kami kembalikan uang itu penilaian kepada kami sudah turun. Sehingga dinyatakan WDP. Tapi kami tidak mempermasalahkan WDP karena kami merasa memperjuangkan hak daripada rakyat penerima program rumah swadaya. Jadi kami bersedia diturunkan yang penting rakyat jangan dikorbankan. Dan setelah uang itu ditarik rakyat itu seluruhnya datang ke kantor kami demo. Kenapa uang kami dirampas dan dirampok. Seolah-olah itu perbuatan kami. Tapi kami langsung masukan di program tahun berikutnya kita serahkan buru-buru, selesaikan baik-baik. Sebab kalau tidak menjadi kasus demo. Itu juga tidak bagus kalau sampai keluar, untuk Komisi V tidak bagus, untuk kita juga tidak bagus. Karena itu sebetulnya program sosial jadi bukan program yang memang harus berbentuk fisik.

Pak Yoseph ini memang ada program FLPP itu yang tidak sepenuhnya terserap. Tapi pengertian terserap itu begini, ini contoh hari ini sajalah hari ini, kita sudah mengajukan permohonan kenaikan harga untuk harga rumah karena kenaikan BBM. Itu dari tahun lalu kami ajukan untuk diberlakukan tahun ini. Sekarang sudah bulan Februari, oleh Departemen Keuangan persetujuannya belum keluar. Itu contoh, jadi tahun yang lalu pun persetujuannya keluarnya itu sangat lambat. Itu persoalan yang pertama harga. Harga itu tidak mengejanya dengan harga yang kita tetapkan tidak mengejar dengan harga bahan bangunan yang ada di lapangan. Dua, kalau kita ngomong penyedia rumah murah itu tidak terlalu banyak yang berminat. Karena keuntungannya tipis Pak. Keuntungannya tipis. Jadi pengusaha-pengusaha properti yang kaliber besar itu tidak mau. Jadi demandnya tinggi supply nya tidak ada, harga diinjak. Bayangkan Pak. Harga diinjak, karena bulan Februari belum ada persetujuan dari Departemen Keuangan. Padahal kita sudah bikin indeks per provinsi harganya sekarang. Kita pakai indeks per provinsi supaya harganya betul-betul up to date. Begitu juga harga rumah susun kita bikin harga yang reasonable-lah yang menguntungkan. Karena mereka punya kewajiban kawasan hunian berimbang. Jadi kita mau paksa mereka membangun rumah-rumah murah ini dari kewajiban kawasan hunian berimbang yang ada undang-undangnya. Jadi kita paksakan. Cuma masalahnya kembali lagi tadi supply nya tidak ada. Terus uang yang diberikan pemerintah juga terbatas. Dia maksimum satu tahun cuma kasih 100 padahal RPJM kita 1.350.000 kalau 100 satu tahun ya cuma 500 ribu. Padahal itu dimulainya bukan dari tahun nol, dari tahun pertama. Ya zaman Pak Harso belum ada itu FLPP masih bantuan uang muka ya. Masih bantuan uang muka. Ya 2 tahun itu bantuan uang muka, setelah saya baru ada FLPP. Jadi memang ini kejar-kejaran antara demand, supply, harga, dan kalau kredit aman Pak, kita kasih bungannya murah banget. Tahun ini saja kita tetapkan lagi jadi tetap 7,25 tetap meskipun ada kenaikan BEW. Kita perbesar bantuan likuidasi pemerintah. Jadi saya rasa bukan penyerapannya. Penyerapannya tidak ada masalah, demand nya Pak. Demandnya tinggi tapi supply nya tidak ada.

Mengenai Indramayu Pak yang kena banjir kita akan segera internalisasi kebutuhan rumahnya, cuma ini terus terang rapat kami di Wapres sebetulnya kami ini harus bekerja sama dengan BNPB meskipun ini bukan skala nasional. Kita cukup bekerja sama dengan gubernur atau bupati. Tapi waktu di wapres tidak ada penugasan kami untuk ini. Ini kami berinisiatif sendiri melakukan inventarisasi dengan memberikan rumah swadaya. Jadi ini pun kami perlu diback up oleh Komisi V karena green light dari Wapres dan BNPB untuk kita masuk ke sana itu tidak ada. Karena sebetulnya bencana inikan tugas BNPB. Kami lancang tangan saja, lancang tangan masuk langsung menginventarisasikan kebutuhan, kita bekerja sama dengan gubernur dan bupati untuk membantu mereka. Jadi nanti kalau ada apa-apa tolong Komisi V bantu saya juga, yang kami takutkan nanti ada permasalahan.

Nah mengenai ini mengenai, Pak Mulyadi ini banyaknya problem di lapangan Pak Mulyadi. Jadi Pak Muhidin, sorry. Pak Muhidin, Pak Mulyadi yang itu lain. Pak Muhidin, ini sebetulnya waktu kita mau terjun ke lapangan kita itu sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bersama-sama dengan dinas dan konsultan yang kita tunjuk. Jadi prosedur mendapatkannya, prosedur mendatanya, prosedur pelaksanaan pekerjaannya itu kita lakukan sosialisasi, tidak serta merta itu tiba-tiba uang turun. Jadi ada sosialisasi, ada pendataan, dan ada pengaturan diajari. Jadi kalau yang namanya uang itu kan masuk ke rekening masing-masing. Belanjanya itu belanja ramai-ramai, kita ajarin. Ketua kelompok itu oleh kelompok masyarakat ditunjuk. Dinas sebetulnya itu pembinaan dan kita gaji. Kita gaji 400 ribu sebulan sekarang kita naikan. Saya sudah komplain sama anak buah saya, kira-kira saja 400 ribu sebulan UMP lah saya bilang begitu. Sekarang sudah naik Pak Djamil ya? Sudah 1 juta lebih. Sudah UMP, karena saya bilang kalau 400 ribu dia disuruh datang ke masyarakat mutar-mutar tak karuan kasian saya bilang. Tapi ditargetkan 3 bulan ya? Kerjanya 3 bulan kan. Sepulun bulan. Jadi dia dikasih lumsum 10 bulan untuk dari mulai pendataan sampai pelaksanaan pekerjaan. Kali 1 juta berapa pesisnya. 1.200.000, jadi dapat 12 juta dia sebetulnya. Cuma kalau dibandingkan 7,5 dikali 1.000 ya susah.

F-PG (H. MUUHIDIN M.SAID, SE, MBA):

Sudah betul Pak Menteri katakan, memang pada saat kita itu betul tidak ada yang salah sebenarnya. Tapi pada saat implementasi ada mereka bikin, justru itu saya kalau di Dapil saya, saya panggil mereka. Pak Djamil tahu. Saya pernah malam-malam itu ibu pelaksanaannya itu kan kasihan juga kan. Karena mereka ini, memang bukan dia yang melaksanakan tapi dia bisa beritahu. Ini nanti dianukan, dia tahan uangnya. Bukan dia yang tahan Pak, artinya bukan lewat dia langsung. Melalui tangan-tangan orang ini jadi ngga ada yang salah sebenarnya, tapi masyarakat yang kena. Jadi umpamanya dia bermain dengan ketua kelompok nanti beli bahan di sini, saya sudah atur. Yang atur itu dari dinas, tahu saya Pak. Saya kita ini mantan kontraktor juga. Jadi saya bilang jangan bermain, masa harga, baru didrop sedikit-sedikit bahannya. Jadi semua Pak Menteri katakan itu sudah betul semua Pak. Tapi pada tataran implementasi terjadilah ini yang kalau dilihat jumlahnya kalau dia ada 100 ribu satu kabupaten atau 500 kan miliaran juga Pak. Kemudian satkernya itulah beritahu, kau nanti beli bahan di sini, beli bahan di sini. Baru didropnya sedikit-sedikit. Ini yang biasanya jadi ribut. Jadi ribut, pasirnya sudah ada sudah hilang lagi pasirnya baru datang lagi batakonya, ada lagi batakonya baru dia drop lagi semennya, karena dibuat sedemikian rupa supaya ada Komunikasi terus, inikan kalau dari Bapak tadi saya sudah katakan tadi kalau kementerian semua sudah bagus. Tetapi dalam tataran implementasinya ada-ada saja namanya juga di daerah, daerah kabupaten lagi kan. Susah itu. Saya kira itu Pak.

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT

Ya, setuju Pak. Jadi kalau implementasi terus terang saya beruntung ada Komisi V yang ikut mengawasi jadi Alhamdulillah program ini bisa berjalan lebih baik Pak. Terima kasih banyak Pak Muhidin. Jadi sudah benarlah itu semuanya. Kita bikin programnya, Pak Muhidin yang bikin pengawasan, jadi jalan lancar ini semua Alhamdulillah. Jadi sudah terjawab WTP ya WTP sudah terjawab, Insya Allah tahun ini kita kembali lagi WTP Pak. Kita perjuangkan untuk kembali karena masalahnya sederhana sekali Pak kita memperjuangkan haknya rakyat, hanya itu saja. Jadi terima kasih banyak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Demikian jawaban dari Pak Menteri. Kalau sudah tidak ada lagi kita langsung ambil kesimpulan. Mohon ini draf kesimpulan. Pokoknya jangan turun lagi gradenya ya Pak. Tahun depan harus sudah WTP ini.

F-PKS (Ir. SIGIT SOSIANTOMO) :

Ini komentar saya saja Pak. Turun gradenya itu karena Pak Menteri tidak melaksanakan SOP yang ada. Kalau tidak terserap mestinya dikembalikan ya kan dan semua saya yakin aparat Bapak tahu. Tapi dengan alasan ini uang rakyat dan tidak dikembalikan justru itu yang jadi masalah menurut saya. Terima kasih. Saya kira itu komentar saya.

KETUA RAPAT:

Draf kesimpulan rapat. Pertama, Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Perumahan Rakyat terhadap beberapa temuan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sampai dengan semester I Tahun 2013. Selanjutnya Komisi V DPR Ri mendesak Kementerian

Perumahan Rakyat untuk segera menyelesaikan tindak lanjut beberapa temuan yang belum diselesaikan dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Komisi V DPR RI, ini normatif Pak Menteri.

Kemudian yang kedua Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat untuk menindaklanjuti rekomendasi kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI baik ke jalan lintas Pantura Jawa Barat, Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara bukan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Utara, serta Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Silakan Pak Menteri. Setuju ya?

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT

Setuju.

KETUA RAPAT:

Hehehehe kalau setuju setuju oke. Demikian, karena sudah tidak ada lagi maka rapat pada sore hari ini namun sebelum kita tutup kami mohon sambutan penutup dari Pak Menteri. Kami persilakan.

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT

**Pak Ketua yang sangat saya hormati,
Pak Wakil Ketua, serta Anggota Dewan yang juga sangat saya cintai.**

Alhamdulillah terima kasih banyak penjelasan saya ternyata bisa diterima dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Dengan demikian dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah maka rapat pada hari ini saya nyatakan di tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.47 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

DRA. PRIMA M.B. NUWA, M.Si
NIP. 196105271992032001

DRAFT